

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Menurut Franita (2016), pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang disebabkan karena lapangan pekerjaan lebih rendah dibandingkan tenaga kerja. Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah makro ekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah karena akan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Pengangguran merupakan keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Pengangguran (*unemployment*) didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labor force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan.

Menurut Sukirno (2006), pengangguran merupakan keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh golongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Pengangguran (*Unemployment*) merupakan masalah yang selalu hampir ada dalam setiap perekonomian, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja (*labor force*) untuk memperoleh pekerjaan sesuai yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Dengan kata lain, pengangguran

merujuk pada situasi atau keadaan di mana seseorang menghadapi ketiadaan kesempatan kerja.

Menurut Riset *et al.* (2015), pengangguran merupakan hal yang akan selalu muncul dalam perekonomian, di mana saat pengeluaran agregatnya lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan faktor-faktor produksi yang telah tersedia dalam perekonomian untuk dapat menghasilkan barang-barang dan juga jasa. Navarrete menjelaskan dalam bukunya "*Underemployment in Underdeveloped Countries*" pengangguran dapat dilukiskan sebagai suatu keadaan di mana adanya pengalihan sejumlah faktor tenaga kerja ke bidang lain yang mana tidak akan mengurangi output keseluruhan sektor asalnya atau dikatakan bahwa produktivitas marginal unit-unit faktor tenaga tempat asal mereka bekerja adalah nol atau hampir mendekati nol atau negatif.

2.1.2 Pengeluaran pemerintah

Menurut Suparmoko (2002), pengeluaran pemerintah dapat bersifat lengkap yaitu pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lainnya. Di samping itu, pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat transfer yaitu pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi. Pengeluaran pemerintah juga merupakan perangkat produk yang dihasilkan untuk memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkat pemerintah (pusat-provinsi-daerah). Di

Indonesia sektor pemerintahan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian. Peran tersebut dituangkan pemerintah dalam bentuk pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan utama pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi pengangguran dan mengendalikan inflasi.

Menurut Sukirno (2000), anggaran pendapatan belanja daerah merupakan rencana kerja pemerintah dalam bentuk satuan untuk kurun waktu satu tahun yang berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Menurut Rifqi (2014), pengeluaran pemerintah merupakan penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. Pada dasarnya setiap pengeluaran negara dilakukan atas landasan prinsip optimalisasi pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Pengeluaran pemerintah harus mampu mencapai beberapa sasaran, seperti peningkatan produktivitas kerja aparatur pemerintah, perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan pembangunan serta terpeliharanya berbagai aset negara dan hasil-hasil pembangunan.

Menurut Zahari (2017), pengeluaran pemerintah merupakan penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan negara atau pemerintah guna mewujudkan fungsinya dalam menciptakan kesejahteraan. Ditinjau dari segi belanja daerah yang dikeluarkan guna membeli barang dan jasa akan menstimulus perluasan lapangan kerja. Pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk aktivitas yang produktif akan mengakibatkan *multiplier effect* bagi perekonomian daerah itu sendiri. Ketika pengeluaran pemerintah tinggi dan aktivitas ekonomi suatu daerah semakin kompleks diharapkan kesempatan kerja akan semakin tinggi dan tingkat pengangguran bisa ditekan.

2.1.3 Upah

Menurut Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 1 ayat (1), upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut

suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Syahputra (2019), mengatakan bahwa upah merupakan sejenis balas jasa yang diberikan perusahaan/organisasi kepada para pekerja harian (pekerja tidak tetap) yang besarnya telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Upah merupakan faktor yang penting bagi pekerja, karena bagaimanapun juga upah bagi pekerja merupakan tempat bergantung bagi kelangsungan hidup pekerja beserta keluarganya. Upah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari karyawan. Saat seseorang melamar pekerjaan, upah menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan karyawan ketika seseorang menyadari bahwa dirinya berkualitas, memiliki potensi yang baik dan dapat berkontribusi terhadap kinerja perusahaan, maka perlu balas jasa yang sesuai dengan kemampuannya. Perusahaan wajib memberi balas jasa berupa upah atas kontribusi yang sudah diberikan oleh karyawan.

2.1.4 Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya dan berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat maka harga barang dan jasa dalam negeri mengalami kenaikan. Meningkatnya harga barang dan jasa menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian inflasi juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam perekonomian.

Nita (2019), mengatakan bahwa inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak hanya menjadi perhatian pemerintah, tetapi juga menjadi perhatian para pelaku usaha, bank sentral maupun masyarakat. Inflasi dapat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah. Inflasi memiliki pengaruh dan dampak baik positif maupun negatif tergantung dari parah atau tidaknya tingkat inflasi. Inflasi dengan tingkat yang rendah justru akan memberikan dampak yang positif bagi perekonomian negara namun sebaliknya, jika inflasi pada kondisi yang tidak dapat dikontrol (*hyperinflasi*) dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian akan kacau dan berdampak pada berhentinya roda perekonomian negara.

Menurut Sukirno (2013), inflasi merupakan fenomena atau peristiwa ekonomi secara makro yang dapat menggambarkan aktivitas dan pencapaian yang dicapai oleh kegiatan ekonomi, baik di suatu wilayah ataupun di suatu negara. Fenomena ekonomi seperti inflasi, tidak mungkin dihindari, melainkan bagaimana cara pemerintah mampu mengendalikan gejolak inflasi yang tinggi dan tidak stabil, agar menjadi relatif lebih rendah dan tetap stabil. Laju inflasi selain merupakan indikator utama melihat kinerja ekonomi suatu negara, tapi dapat juga merupakan target yang akan dicapai pemerintah, karena sebagai asumsi dalam menyusun nota keuangan negara yakni APBN pada tiap tahunnya juga mengacu pada seberapa besar target inflasi yang akan dicapai pada tahun tersebut. Jadi laju inflasi harus dapat dikendalikan oleh pemerintah bersama dengan Bank Indonesia yang telah diamanahkan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Tugas dan Tanggung jawab Bank Indonesia.

2.1.5 PDRB

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat swasta dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya dapat dinilai dari besarnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa bertambah sehingga meningkatkan kemakmuran dalam masyarakat (Sukirno, 2011: 331).

Silalahi (2017), mengatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. PDRB yang selalu menurun menyebabkan ketidakpastian bagi pembangunan di daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di daerah akan menurun jika PDRB selalu menurun tiap tahunnya. Kegiatan perekonomian juga akan menurun dan mengakibatkan pendapatan nasional mengalami kemunduran serta pengangguran yang semakin bertambah dan tingginya tingkat kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan tersebut akan berdampak pada naiknya tingkat kriminalitas dalam suatu daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik (2013), PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah tertentu dan dapat juga dikatakan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB merupakan salah satu indikator

penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tertentu dan dalam suatu periode tertentu (setahun) yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu negara atau suatu daerah, ada dua cara dalam penyajian PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Noviyani (2007), mengatakan bahwa PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga barang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi sedangkan PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun.

2.2 Studi Terkait

Yanti (2011), meneliti variabel apa saja yang mempengaruhi faktor pengangguran di Jawa Tengah pada tahun 1991-2011. Metode analisis yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu berupa deret berskala (*time series*). Alat analisis menggunakan regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Dari hasil penelitian hanya menunjukkan bahwa variabel PDRB, inflasi, dan upah minimum memiliki pengaruh signifikan, sedangkan pertumbuhan penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran.

Lestari (2018), meneliti seberapa besar pengaruh inflasi, upah minimum, PDRB, dan nilai tukar terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2004-2013. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Data ini

menggunakan metode kombinasi antara data runtun waktu (*time series*) dari tahun 2004-2013 dan *cross section* terdiri dari 33 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika inflasi nilainya naik, maka akan menaikkan jumlah tingkat pengangguran. Upah minimum regional memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika upah minimum regional nilainya naik, maka jumlah tingkat pengangguran naik. PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika PDRB nilainya naik, maka akan menurunkan jumlah tingkat pengangguran. Nilai tukar memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika nilai tukar nilainya naik, maka akan menurunkan jumlah tingkat pengangguran.

Brahma (2019), meneliti seberapa besar pengaruh produk domestik regional bruto, inflasi, upah minimum, dan jumlah penduduk terhadap pengangguran di Indonesia periode 2011-2017. Pada penelitian ini digunakan data panel 33 provinsi selama tujuh tahun terhitung dari 2011 – 2017 yang merupakan kolaborasi data *time series* dan *cross section*. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Uji hipotesis dianalisis menggunakan program *eviews 9.0*. Hasil penelitian membuktikan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh negatif terhadap pengangguran, inflasi berpengaruh positif terhadap pengangguran, upah minimum berpengaruh negatif terhadap pengangguran, sementara jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pengangguran.

Sari (2016), meneliti seberapa besar pengaruh PDRB, UMK, PMDN, dan pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder selama 5 tahun dari tahun 2010-2014. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu gabungan antara *time series* dan *cross section*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel PDRB, UMK, PMDN dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur, sedangkan PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur.

Septian (2017), meneliti seberapa besar pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, upah minimum dan pertumbuhan penduduk terhadap pengangguran, yang diamati dalam penelitian ini adalah pengangguran sebagai variabel dependen kemudian pertumbuhan ekonomi, investasi, pengeluaran pemerintah, upah minimum dan pertumbuhan penduduk sebagai variabel independen. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu gabungan antara *time series* dan *cross section* yang dihitung melalui pendekatan *common effect* model penelitian menunjukkan bahwa variabel independen pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, upah minimum dan pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif, upah minimum dan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif. Untuk variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia.

Rohman (2018), meneliti seberapa besar pengaruh angkatan kerja, pendidikan, (yang diproduksi dengan rata-rata lama sekolah), investasi swasta (penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri), dan pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2015. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan estimasi *fixed effect* model. Pengolahan data menggunakan *softwar eviewa 8*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama, angkatan kerja, pendidikan, investasi swasta, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Rosydah (2018), meneliti variabel apa saja yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2010-2015. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka antara lain yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi dan penanaman modal dalam negeri. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode regresi data panel. Dalam penggunaan model regresi data panel model yang layak digunakan untuk estimasi akhir yaitu *fixed effect*. Model dari hasil pengujian antara *fixed effect* dan *random effect* dengan menggunakan uji *hausman test*. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2010-2015